

Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Islam Modern

Ubaidillah Ahmad Mahfud

Email : ahmad.mahfud70@gmail.com

Abstract

Islam as a religion, is believed and understood as a set of rules and regulations (aqidah wa al-shariah) sourced from Allah. Democracy is a people's government and involves all aspects, namely politics, gender, gender, religion, social rights race, and so on. Islam is often discredited with democracy in two ways. First, when Islam is compared to democracy. Second, when Islam is considered to be in conflict with democracy. Though both can be adjusted together with good values, for the creation of a democratic nation. Islam and democracy can be adjusted together with good values, namely through the promotion of democratic values. Efforts to disseminate democratic values are the results of Abdurrahman Wahid's thoughts. He is a democratic figure in Indonesia. According to Abdurrahman Wahid, democracy is not only a matter of how to maintain it procedurally, but also how we animate democratic values so that the process of dialogue or deliberation becomes the main thing in managing relationships and managing our diverse economy, culture, politics so that there is an intertwined relationship for win-win solution.

Keywords: Islam; Democracy; Abdurrahman Wahid;

Abstrak

Islam sebagai agama, diyakini dan dipahami merupakan seperangkat ketentuan dan aturan (aqidah wa al-syariah) yang bersumber dari Allah Swt. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat dan menyangkut kepada seluruh aspek, yaitu politik, gender, gender, agama, ras bak sosial, dan sebagainya. Islam kerap sekali didiskreditkan dengan demokrasi dalam dua hal. Pertama, ketika Islam dibandingkan dengan demokrasi. Kedua, ketika Islam dianggap bertentangan dengan demokrasi. Padahal keduanya dapat disesuaikan bersama nilai-nilai yang baik, demi terciptanya bangsa yang demokratis. Islam dan demokrasi dapat disesuaikan bersama dengan nilai-nilai yang baik, yaitu dengan upaya sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Upaya sosialisasi nilai-nilai demokrasi merupakan tulisan hasil pemikiran Abdurrahman Wahid. Ia adalah salah satu tokoh demokratis di Indonesia. Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi tidak hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural, melainkan bagaimana kita menjinwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog atau musyawarah menjadi hal utama dalam menata pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik kita yang majemuk sehingga muncul adanya suatu hubungan yang terjalin untuk saling menguntungkan.

Kata Kunci: Islam; Demokrasi; Abdurrahman Wahid;

PENDAHULUAN

Islam dan demokrasi selalu menjadi kajian menarik di Barat maupun di Timur, di Utara maupun di Selatan, di negara maju maupun yang berkembang. Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi selalu dihadapkan dengan Barat. Hal ini didasarkan pada lahirnya Islam di Arab dan berkembang pesat di wilayah selatan. Sementara demokrasi lahir di Yunani dan berkembang pesat di Eropa (utara). Oleh sebab itu, pertemuan Islam dan Yunani merupakan pertemuan peradaban, ideologi, dan latar belakang sejarah yang terlihat jauh berbeda.

Islam sebagai agama, diyakini dan dipahami merupakan seperangkat ketentuan dan aturan (*aqidah wa al-syariah*) yang bersumber dari Allah Swt.¹ Sedangkan demokrasi secara bahasa, berasal dari kata “*demos*” yang memiliki arti rakyat, dan “*kratos*” yang artinya kekuasaan.² Jadi secara bahasa, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Adapun secara literal, demokrasi memiliki pengertian sebagai sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³

Sejalan dengan pengertian demokrasi di atas, yang hanya dibatasi pada wilayah politik (kekuasaan), yakni pada pemerintahan rakyat. Robert Dahl (1989) yang lebih lanjut mengatakan, “*The demos should include all adult subject to the binding collective decisions of the association*”.⁴ Maksud dari itu adalah pengertian demokrasi tidak lagi dibatasi pada aspek politik saja. Melainkan sudah menyangkut pada seluruh aspek, yaitu politik, gender, agama, ras hak sosial, dan sebagainya.

Islam sendiri kerap sekali didiskreditkan dengan demokrasi dalam dua hal. Pertama, ketika Islam dibandingkan dengan demokrasi. Kedua, ketika Islam dianggap bertentangan dengan demokrasi. Padahal keduanya dapat disesuaikan bersama nilai-nilai yang baik, demi terciptanya bangsa yang demokratis. Islam dan demokrasi dapat

¹Ajat Sudrajat, *Khazanah Intelektual Politik Islam*, (Yogyakarta: TrueMedia Utama, 2011), hlm, 57.

²Eko Taranggono, *Upaya Mencari Titik Temu*, Jurnal Al-Afkar, Edisi VI, Tahun ke 5: Juli –Desember 2002, hlm. 1.

³Pengertian demokrasi di atas merupakan pengertian dari pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Lihat, Hamid Basyaib Edt., *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 125.

⁴Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*, (London: Yale University Press, 1989), hlm. 22., Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 28-29.

disesuaikan bersama dengan nilai-nilai yang baik, yaitu dengan upaya sosialisasi nilai-nilai demokrasi.

Abdurrahman Wahid mengungkapkan, nilai-nilai demokrasi harus lebih dulu disosialisasikan dan ditunjukkan pentingnya kepada rakyat.⁵ Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa demokrasi tidaklah hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural, melainkan bagaimana kita menjiwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog atau musyawarah menjadi hal utama dalam menata pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik kita yang majemuk sehingga muncul adanya suatu hubungan yang terjalin untuk saling menguntungkan.⁶ Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini memaparkan bagaimana pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian/ Makna Islam dan Demokrasi

Islam merupakan sebuah agama. Islam sebagai agama diyakini dan dipahami adalah seperangkat ketentuan dan aturan (*aqidah wa al syariah*) yang sumbernya berasal dari Allah Swt. Agama sendiri, dalam keseluruhan aspek ajarannya, guna menjadi panduan bagi manusia. Agama menjadi panduan bagi kehidupan manusia, dimaksudkan mampu menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia. Misalnya dalam perilaku politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.⁷

Islam memiliki kitab suci, yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an menghimpun kumpulan ajaran Allah Swt. Al-Qur'an kemudian menjadi rujukan bagi setiap perilaku manusia. Namun demikian, ajaran-ajaran yang ada dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan. Maka Allah Swt mengutus Nabi Muhammad saw. untuk berperan sebagai orang menjelaskan al-Qur'an.⁸ Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan atas al-Qur'an secara operasional terhadap ajaran-ajaran yang terdapat pada al-Qur'an. Oleh sebab itu, al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw (Sunnah) menjadi rujukan bagi perilaku umat Islam.

⁵ Abdurrahman Wahid, dkk., *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM NU SIY, 1993), hlm, 100.

⁶ Muhammad Rifa'i, *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009* cetakan ke-3 (Yogyakarta: Garasi House Of Book, 2012), hlm. 91.

⁷ Ajat Sudrajat, *Khazanah Intelektual Politik Islam*, hlm. 57.

⁸ Nabi Muhammad saw. disebut sebagai Mubayyin al-Qur'an. Lihat, *ibid.*,

Berdasarkan pada hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Allah Swt. yang memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia. Dalam perhatian inilah, Allah juga dipahami sebagai pemilik kedaulatan mutlak atas manusia. Allah memiliki nama baik “*al-Khaliq*”, yang artinya Allah Swt. yang menentukan segala ketentuan dan aturan untuk sekalian ciptaannya (*al-Makhlūq*), termasuk manusia di dalamnya. Hal tersebut yang kemudian mewajibkan manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah Swt., termasuk pada ketentuan dan aturan yang ditetapkannya.⁹

Aturan dan ketentuan yang berasal dari Allah Swt. dilihat memiliki nilai kemutlakan (*ultimate*), hal ini berdasarkan pada yang telah dipaparkan di atas. Dengan demikian, penilaian atas sesuatu yang diatur atau ditentukan dalam Islam untuk mengatur/ memberi petunjuk terhadap perilaku manusia secara pasti dan mutlak, telah menentukan hal-hal yang termasuk dalam kategori benar atau salah.¹⁰

Adapun dengan dikenalnya paham tentang demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu pemikiran klasik/ karya klasik yang besar di bidang ilmu sosial pada abad kedua puluh.¹¹ Sebenarnya, gagasan demokrasi bermula pada awal abad ke-5 SM di Yunani Kuno, khususnya dikalangan penduduk Athena (500-330 SM). Pada zaman tersebut, demokrasi yang berlaku adalah demokrasi langsung dalam sebuah negara-kota. Penduduknya dapat berpartisipasi secara langsung dalam keputusan politik. Namun demikian, terdapat orang-orang yang dikecualikan dalam demokrasi langsung tersebut, yaitu perempuan, budak, dan pekerja asing.¹²

Secara historis, tokoh yang dianggap membawa demokrasi ke Athena Kuno adalah Solon dan Pericles.¹³ Menurut Pericles, demokrasi adalah pemerintahan yang berada di tangan mayoritas, bukan di tangan sekelompok kecil orang. Pada perselisihan pribadi, semua setara dihadapan hukum. Sementara dalam urusan publik, keuntungan

⁹Ajat Sudrajat, *Khazanah Intelektual Politik Islam*, hlm, 57.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, socialism, and democracy*, diterjemahkan oleh Teguh Wahyu Utomo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 489.

¹²Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), hlm. 166.

¹³*Ibid.*, hlm. 166-167.

akan diperoleh oleh mereka yang unggul dengan kecakapannya. Pertimbangan kelas tidak diperkenankan dalam perolehan jasa, termasuk bagi mereka yang miskin.¹⁴

Model demokrasi di Athena memiliki empat prinsip. Pertama, warga negara langsung membuat keputusan-keputusan politik dan mengawasinya. Kedua, terdapat kesetaraan politik dan hukum bagi segenap warga negara dalam memberikan suara, dialog terbuka, dan hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ketiga, kebebasan politik dan kewarnegaraan dijamin sepenuhnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi ciri penting di dalam Dewan, Majelis, dan institusi-institusi politik lainnya. Keempat, dalam proses penentuan kebijakan. Pemungutan suara (*voting*) dilakukan setelah semua argumentasi disampaikan. *Voting* dipandang sebagai sarana terbaik untuk mengetahui kemampuan warga negara mengenai masalah-masalah tertentu.¹⁵

Pemikiran mengenai demokratis bertumpu pada skema rasionalis dari tindakan manusia dan dari nilai-nilai kehidupan, sebagaimana yang sudah tercermin dalam doktrin klasik.¹⁶ Secara etimologis, menurut Robert Dahl yang dikutip oleh Eko Tranggono,¹⁷ kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata “*demos*” yang memiliki arti rakyat, dan “*kratos*” yang artinya kekuasaan.¹⁸ Jadi secara bahasa, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat.

Secara literal, demokrasi memiliki pengertian sebagai sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁹ Pengertian demokrasi yang lazim tersebut, sebenarnya sebuah definisi yang problematis jika dilihat dari kenyataan yang diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, demokrasi memiliki pengertian yang normatif dan bukan berpaku pada sebuah entitas riil.

Menurut Sidney Hook yang dikutip oleh Winengan, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau

¹⁴*Ibid*, hlm. 167.

¹⁵*Ibid*, hlm. 168.

¹⁶Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, socialism, and democracy*, hlm. 490.

¹⁷Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁸Eko Taranggono, *Upaya Mencari Titik Temu*, hlm. 1.

¹⁹Pengertian demokrasi di atas merupakan pengertian dari pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Lihat, Hamid Basyaib Edt., *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, hlm. 125.

arah kebijakan di balik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²⁰

Sedangkan pengertian lain mengenai demokrasi yang diberikan oleh Jamil Salmi, demokrasi adalah sebuah konsep yang mana rakyat mampu memilih/ menentukan dan mengotrol nasibnya sendiri.²¹ Oleh karena itu, hal yang terpenting dari demokrasi menurut Jamil Salmi adalah seberapa nyata pilihan dan kontrol yang dimiliki oleh masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal yang dikhawatirkan dalam pemikiran demokrasi adalah demokrasi menjadi sebuah konsep yang kosong di dalam masyarakat kapitalis. Misalnya yang terjadi di Republik Federal Jerman, Austria, Jepang, dan Amerika Serikat.²²

Perbedaan dan Persamaan Islam dan Demokrasi

Pada Islam terdapat aturan dan ketentuan yang pasti dan mutlak dari luar diri manusia, yaitu Allah. Maka berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi tidak ada intervensi yang berasal dari luar diri manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa pemaparan mengenai demokrasi di atas, maka demokrasi mengandung tiga unsur penting, yaitu unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, dan pemilihan yang bebas. Selain itu, dapat diketahui juga ruang lingkup dari demokrasi adalah pada persoalan kemanusiaan, dari manusia kepada manusia. Demokrasi juga fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan persoalan yang kekinian.²³

Pada demokrasi tidak terdapat nilai-nilai yang bercorak ilahiyah. Tidak ada juga nilai-nilai yang dipandang transendental yang bersifat abadi. Putusan terhadap hal yang benar dan salah yang berasal dari demokrasi bercorak relatif, yang sifatnya masih bergantung kepada hasil kesepakatan bersama dari suatu rakyat. Keputusan dan aturan dalam Islam yang dilembagakan dalam Islam bersifat mutlak, sedangkan keputusan dan

²⁰Winengan, *Wacana Intelektual Muslim Indonesia Tentang Kompatibilitas Islam dengan Demokrasi*, Jurnal Ulumuna, Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005, hlm. 205.

²¹Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society*, diterjemahkan oleh Slamet Raharjo, (Yogyakarta: Pilar Humana, 2005), hlm. 237.

²²*Ibid*, hlm. 231.

²³Ajat Sudrajat, *Khazanah Intelektual Politik Islam*, hlm, 60.

aturan yang dilembagakan sebagai hasil dari demokrasi tidak memiliki kemutlakan dan nilai *transenden* (spiritual).²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas memang dapat diketahui bahwa antara Islam dan demokrasi tidak memiliki kepemilikan kemutlakan dan kedaulatan yang berbeda. Selain itu, dari segi metode, Islam dan demokrasi berbeda. Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan *muamalah* manusia. Sedangkan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja sama antara anggota masyarakat serta simbol yang membawa banyak nilai-nali positif.²⁵ Oleh karena itu Islam dengan sendirinya mampu bergerak, menyesuaikan, dan mengharmonisasikan dengan demokrasi.

Akan tetapi, ada cara pandang yang salah, jika menjajarkan Islam dan demokrasi secara serta merta. Hal ini seperti yang diungkapkan Ajat Sudrajat dalam bukunya yang berjudul *Khazanah Intelektual Politik Islam*, tepatnya dalam pembahasan “Islam dan Demokrasi: Masalah Adaptasi Parsial”, Islam merupakan agama dengan seperangkat ketentuan dan aturan yang terkait dengan otoritas Allah Swt., secara mutlak dan pasti. Ia juga mengutip tulisan dari Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa orang yang menyatakan Islam dan demokrasi memiliki segi-segi persamaan. Hal tersebut hanya berarti menerangkan sebagian dari hakikatnya. Pada dasarnya hakikat yang sempurna adalah antara Islam dan demokrasi memiliki perbedaan. Lebih tepatnya adalah Islam dan demokrasi memiliki hal-hal yang bersesuaian, tetapi juga memiliki banyak hal-hal yang tidak bersesuaian.²⁶

Menurut Dhiya’uddin Ar-Rais yang dikutip oleh Fahmi Huwaydi, terdapat persamaan antara Islam dan demokrasi. Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa terdapat beberapa sisi kesamaan yang mempertemukan Islam dengan demokrasi sehingga bersesuaian, tetapi disisi lain juga banyak sisi perbedaan keduanya sehingga terdapat hal-hal yang tidak bersesuaian. Menurutnya, terdapat persamaan pada bagian-bagian yang menyangkut pemikiran sistem politik antara umat atau rakyat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dalam bidang

²⁴*Ibid.*,

²⁵Fahmi Huwaydi, *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Kairo: Markaz Al-Ahram, 1993), diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 151.

²⁶*Ibid.*, hlm. 61.

dan politik. Selain itu, unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi dan keistimewaan-keistimewaannya juga terkandung dalam Islam.

Adapun persamaan antara Islam dengan demokrasi adalah sebagai berikut:²⁷

1. Jika yang dimaksud dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Maka pengertian tersebut sudah ada dalam sistem negara Islam. Namun demikian, rakyat harus memahami Islam secara komprehensif.
2. Jika yang dimaksud dalam demokrasi terdapat dasar-dasar politik atau sosial tertentu. Misalnya asas persamaan dihadapan Undang-Undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, dan memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak untuk hidup, bebas, dan mendapat pekerjaan serta hak-hak lainnya. Dasar-dasar politik dan hak-hak tersebut juga sudah dijamin dalam Islam. Namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam Islam. Pandangan Islam mengenai hak-hak tersebut sangat beragam atau kadang dapat beragam. Dalam Islam terkadang menganggap hak-hak tersebut sebagai hak Allah Swt dan terkadang juga menganggap sebagai hak-hak bersama antara Allah Swt. dan hamba-hambanya.
3. Apabila dalam demokrasi memiliki definisi bahwa sistemnya diikuti dengan realisasi asas pemisahan antara kekuasaan-kekuasaan. hal tersebut juga sudah ada dalam sistem Islam. Misalnya dalam kekuasaan legislatif. Kekuasaan dalam demokrasi apapun diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan imam atau presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada al-Qur'an dan hadist atau ijma' atau ijtihad. Dengan demikian. Pembuatan Undang-Undang atau hukum tersebut terpisah dari imam.

Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid

Menurut pemikiran Abdurrahman Wahid, demokrasi tidak hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural, melainkan bagaimana kita menjiwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog atau musyawarah menjadi hal utama dalam menata

²⁷Fahmi Huwaydi, *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, hlm. 196-197.

pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik kita yang majemuk sehingga muncul adanya suatu hubungan yang terjalin untuk saling menguntungkan.²⁸ Oleh sebab itu, pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi menonjol pada tulisannya tentang sosialisasi nilai-nilai demokrasi.

Membahas tentang sosialisasi nilai-nilai demokrasi pemikiran Abdurrahman Wahid. Maka yang perlu diketahui pertama kali adalah apa yang dimaksud nilai-nilai demokrasi itu sendiri menurut Abdurrahman Wahid. Kedua, pandangan Abdurrahman Wahid mengenai nilai-nilai demokrasi yang terlaksana di Indonesia. Terutama pada pandangan Abdurrahman Wahid mengenai komponen-komponen dari masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi.²⁹ Penjelasan mengenai pemaparan ini adalah sebagai berikut.

Islam dan Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi menurut Abdurrahman Wahid, memiliki sifat pokok dan sifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok. Nilai demokrasi yang pokok adalah kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan. Menurut Syeh Ali Abdurraziq yang dikutip Abdurrahman Wahid, inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan *syura*. Dalam Islam nilai dasar yang namanya kebebasan, keadilan, dan *syura* harus diwujudkan dalam bentuk yang jelas.³⁰

Dalam arti persamaan, *musyawah bainannas*, yaitu persamaan antar manusia. Secara teologis/ aqidah, persamaan itu adalah persamaan diantara umat manusia pada dasarnya, dan dimuka undang-undang yang dibuat manusia dalam mengatur kehidupannya. Adapun secara akidah, secara moral itu tidak sama dari orang-orang ke orang. Oleh sebab itu, ada kata-kata *Inna akramakum indallabi adqakum*. Pokok ukurannya adalah ukuran manfaat, asas manfaat yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, yang lebih bermanfaat yaitu yang lebih utama.³¹

²⁸ Muhammad Rifa'i, *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009* cetakan ke-3 (Yogyakarta: Garasi House Of Book, 2012), hlm. 91.

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Agama, Demokrasi, dan Transformasi*, hlm. 89.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89-90.

³¹ *Ibid.*, hlm. 92-93.

Pada arti kebebasan, menurut Abdurrahman Wahid arti dari kebebasan itu tidak boleh mutlak dalam pandangan agama atau dalam pandangan teologis. Hal ini dikarenakan, kalau mutlak nanti manusia bisa mengklaim dirinya sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kebebasan tidak boleh mutlak, harus ada batasnya. Hal ini membawa pada suatu persoalan, bahwa unsur-unsur pelaksana demokrasi, yaitu masyarakat bisa saja sambil mendukung demokrasi, menyatakan demokrasi, tapi perilakunya justru menghambat demokrasi. Mereka melakukan itu, karena mereka mempunyai wewenang.³²

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi, untuk kalangan muslim telah terjadi dialog. Kadangkala bersifat intensif; perkembangan dari nilai-nilai dasar demokrasi itu kemudian ditentukan oleh bentuk-bentuk yang dikembangkan oleh orang Islam. Hubungan antara nilai dasar dengan pelaksanaan dari proses demokrasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membawa pada skala prioritas.³³

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia sudah ada, paling tidak kelembagaannya sudah jalan, yaitu adanya parlemen, ada MPR, DPR, DPRD Tingkat I, tingkat II, juga ada lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah yang tidak ada di Undang-Undang Dasar, bisa diundangkan, seperti Papol dan Golkar; atau sama sekali tidak ada undang-undangnya, tapi dibiarkan hidup, karena hanya peraturan saja. Contohnya BP4 dalam soal perkawinan. Hal itu sebetulnya sudah pelaksanaan demokrasi. Apalagi keluarga terancam kepunahan, maka yang bersangkutan dipanggil, atau diminta lapor ke BP4. Di sana ditanyai sejelas-jelasnya, diusahakan agar bisa dipertemukan kembali dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya demokrasi dalam bentuk yang primer ada. Tidak bisa seorang suami menceraikan istrinya. Ini faktor keadilan, yang nanti dirumuskan dalam proses keadilan, proses hukum.³⁴

³²*Ibid.*, hlm. 94

³³*Ibid.*, hlm. 97

³⁴*Ibid.*, hlm. 97

Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi

Menurut Abdurrahman Wahid untuk mengembangkan demokrasi dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi lebih dulu harus disosialisasikan, ditunjukkan pentingnya kepada rakyat. Ia juga memberikan beberapa cara untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Pertama, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Cara ini merupakan pendekatan normatif, langsung menunjukan ini-ini-ini.

Cara yang kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokratis dari praktek pengalaman. Rakyat diajak untuk mengorganisasikan diri, diajak untuk membiasakan diri melakukan kerja-kerja kolektif, kerja jama'i dengan memberlakukan nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Misalnya LSM melakukan Usaha Bersama (UB), ini lembaga pra-koperasi. Hal tersebut sudah proses demokratisasi, karena didalamnya terdapat ada komponen yang paling penting. Rakyat memahami dan melaksanakan sejumlah nilai atau melaksanakan dulu baru memahami. Pokok terpenting adalah terwujudnya nilai-nilai demokratisasi.³⁵

Selain itu, Abdurrahman Wahid juga menawarkan pendekatan yang dapat dipraktekkan untuk sosialisasi nilai-nilai demokrasi, yaitu *learning by doing* (belajar sambil melaksanakan). Di pihak lain, yang sifatnya normatif tadi, ada juga sifatnya yang pembudayaan. Pembudayaan itu adalah suatu proses yang mana orang melakukan kerja sebetulnya. Jadi pendekatannya pengenalan. Orang diajak untuk mengenal nilai-nilai demokrasi, dengan tidak perlu menyebut ajakannya berupa nilai demokrasi. Tidak perlu juga membangun proyek dari bawah. Tunjukkan saja bahwa ini nilai penting untuk rakyat.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm. 101.

³⁶*Ibid.*, hlm. 101

PENUTUP

Kesimpulan

Islam merupakan sebuah agama. Islam sebagai agama diyakini dan dipahami adalah seperangkat ketentuan dan aturan (*aqidah wa al syariah*) yang sumbernya berasal dari Allah Swt. Kitab suci agama Islam adalah al-Qur'an. Al-Qur'an menghimpun kumpulan ajaran Allah Swt. Nabi Muhammad saw., memberikan penjelasan atas al-Qur'an secara operasional terhadap ajaran-ajaran yang terdapat pada al-Qur'an. Oleh sebab itu, al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw (Sunnah) menjadi rujukan bagi perilaku umat Islam. Allah Swt. yang memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia. Dalam perhatian inilah, Allah juga dipahami sebagai pemilik kedaulatan mutlak atas manusia.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal yang terpenting dalam demokrasi adalah sebuah konsep yang mana rakyat mampu memilih/ menentukan dan mengontrol nasibnya sendiri.

Pada Islam terdapat aturan dan ketentuan yang pasti dan mutlak dari luar diri manusia, yaitu Allah. Maka berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi tidak ada intervensi yang berasal dari luar diri manusia. Demokrasi mengandung tiga unsur penting, yaitu unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, dan pemilihan yang bebas. Selain itu, dapat diketahui juga ruang lingkup dari demokrasi adalah pada persoalan kemanusiaan, dari manusia kepada manusia. Demokrasi juga fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan persoalan yang kekinian.

Islam dan demokrasi memang memiliki perbedaan dan persamaan yang bersifat hakikat. Akan tetapi, akan ada cara pandang yang salah, jika menjajarkan Islam dan demokrasi secara serta merta. Islam juga kerap sekali didiskreditkan dengan demokrasi. Terutama pada asumsi, bahwa Islam dianggap bertentangan dengan demokrasi. Melalui pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Terdapat nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Islam.

Sebaliknya, proses demokratisasi dapat menjadi tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan negara, sekaligus juga dapat memberikan tempat untuk agama. Islam akan terjamin, maksudnya adalah demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari Islam.

Abdurrahman Wahid merupakan salah satu demokratis di Indonesia. Menurut pemikirannya, menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi tidak hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural, melainkan bagaimana kita menjiwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog atau musyawarah menjadi hal utama dalam menata pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik kita yang majemuk sehingga muncul adanya suatu hubungan yang terjalin untuk saling menguntungkan. Oleh sebab itu, pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi menonjol pada tulisannya tentang sosialisasi nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi menurut Abdurrahman Wahid, memiliki sifat pokok dan sifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok. Nilai demokrasi yang pokok adalah kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan. Dalam Islam nilai dasar demokrasi yang namanya kebebasan, keadilan, dan *syura* harus diwujudkan dalam bentuk yang jelas. Adapun dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah ada, paling tidak kelembagaannya sudah jalan, yaitu adanya parlemen, ada MPR, DPR, DPRD Tingkat I, tingkat II, juga ada lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah yang tidak ada di Undang-Undang Dasar, bisa diundangkan,

Abdurrahman Wahid juga memberikan cara untuk mengembangkan demokrasi dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi lebih dulu harus disosialisasikan, ditunjukkan pentingnya kepada rakyat. Ia juga memberikan beberapa cara untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Pertama, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Cara yang kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokratis dari praktek pengalaman. Selain itu, Abdurrahman Wahid juga menawarkan pendekatan yang dapat dipraktekkan untuk sosialisasi nilai-nilai demokrasi, yaitu *learning by doing* (belajar sambil melaksanakan) dan pendekatan pengenalan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., H. Fuad Ihsan. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Anis, Muhammad. *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- A. Schumpeter, Joseph. *Capitalism, socialism, and democracy*. Diterjemahkan oleh Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Basyaib, Hamid. Edt. *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. London: Yale University Press, 1989., Didi Krisna. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Huwaydi, Fahmi. *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*. Kairo: Markaz Al-Ahram, 1993. diterjemahkan oleh Abdul, Muhammad Ghaffar. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rifa'i, Muhammad. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009* cetakan ke-3. Yogyakarta: Garasi House Of Book, 2012.
- Salmi, Jamil. *Violence and Democratic Society*. Diterjemahkan oleh Slamet Raharjo. Yogyakarta: Pilar Humania, 2005.
- Sudrajat, Ajat. *Khazanah Intelektual Politik Islam*. Yogyakarta: TrueMedia Utama, 2011.
- Taranggono, Eko. *Upaya Mencari Titik Temu*. Jurnal Al-Afkar, Edisi VI, Tahun ke 5: Juli –Desember 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Demokrasi Atas Bawah* Cet. Ke-3, disunting oleh Arief Affandi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- _____, dkk. *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM NU SIY, 199.
- Winengan. *Wacana Intelektual Muslim Indonesia Tentang Kompatibilitas Islam dengan Demokrasi*. Jurnal Ulumuna, Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005.